

Jelang MotoGP, Ketua DPD gelar rakor pembangunan Sirkuit Mandalika



<https://www.motorplus-online.com>

“Rakor ini penting, mengingat event MotoGP yang rencana digelar di bulan Oktober 2021, pihak Dorna sebagai lisensor akan datang ke Indonesia dua kali”

Jakarta (ANTARA) - DPD RI menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Menteri PUPR, Gubernur NTB dan ITDC dalam rangka mempercepat pembangunan Sirkuit Mandalika dan fasilitas pendukung dapat terbangun sesuai jadwal.

"Rakor ini penting, mengingat event MotoGP yang rencana digelar di bulan Oktober 2021, pihak Dorna sebagai lisensor akan datang ke Indonesia dua kali. Pertama di bulan Februari untuk melihat progress pembangunan Sirkuit, dan kedua, di bulan Juni untuk menentukan kelayakan sirkuit dan fasilitas pendukungnya," kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Rakor yang digelar di rumah jabatan Ketua DPD RI itu diikuti Menteri PUPR M Basuki Hadimoeljono, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Dirut ITDC Abdulbar M Mansoer, Ketua Umum KADIN NTB Faurani dan sejumlah pejabat eselon I Kementerian PUPR dan para Kadis Pemprov NTB.

Sementara Ketua DPD didampingi Ketua Komite III Sylviana Murni dan Wakil Ketua Komite II Bustami Zainudin dan Senator dapil NTB Sukisman.

LaNyalla menyampaikan pada tahun 2021 Indonesia mempunyai dua kegiatan internasional *sport tourism* yaitu Piala Dunia Sepakbola U-20 dan MotoGP Series di Mandalika.

"Untuk event Piala Dunia U-20, FIFA sudah selesai melakukan verifikasi stadion. Di Jakarta, Palembang, Surabaya, Solo dan Bali. Nah sekarang tinggal Sirkuit Mandalika. Makanya harus dipastikan lulus verifikasi dari Dorna," katanya.

Sementara itu Gubernur NTB dalam paparannya menyampaikan beberapa hal yang mendesak untuk direalisasikan kepada Kementerian PUPR, terkait konektivitas dan infrastruktur Mandalika.

Di antaranya peningkatan jalan akses dari Pelabuhan Gili Mas menuju Mandalika, penambahan jalur jalan akses MotoGP, dan penyediaan air baku Mandalika.

Selain itu ada dua pembangunan kawasan penunjang sebagai potensi ekonomi yang bisa dimaksimalkan yaitu pembangunan jalan daerah potensial di Kabupaten Sumbawa dan pengembangan infrastruktur di Kabupaten Bima ke Labuan Bajo.

"Karena ini bisa untuk sport tourism kalau kita menggelar event sepeda Tour De Labuhan Bajo-Sape-Bima-Mandalika," kata Zulkieflimansyah.

Menanggapi beberapa usulan dan masukan terkait Mandalika, Menteri Basuki meyakinkan bahwa anggaran untuk Mandalika yang sudah dipatok pemerintah sebesar Rp1,7 triliun tidak dialihkan dan tidak terkena refocusing.

"Memang agak melambat karena pandemi saja. Anggarannya ada dan aman. Jadi tinggal dipercepat kerjanya saja," ungkap Basuki.

Pewartanya: Zubi Mahrofi

Editor: Risbiani Fardaniah

COPYRIGHT © ANTARA 2020

Sumber Berita:

1. <https://www.antaraneews.com/berita/1870252/jelang-motogp-ketua-dpd-gelar-rakor-pembangunan-sirkuit-mandalika>
2. <https://www.news.beritabali.com/read/2020/12/02/202012030003/gubernur-ntb-desak-percepatan-infrastruktur-jelang-even-motogp-mandalika>
3. <https://koin24.co.id/percepat-mandalika-ketua-dpd-pertemuan-menteri-pupr-dan-gubernur-ntb/>
4. <https://www.postkotantb.com/2020/12/gubernur-ntb-desak-pembangunan-kek.html>

Catatan:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus menjelaskan pada Pasal 1 angka 1 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus menyatakan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Selanjutnya dalam Penjelasan Umum dijelaskan bahwa Fasilitas yang diberikan pada KEK ditujukan untuk meningkatkan daya saing agar lebih diminati oleh penanam modal. Fasilitas tersebut terdiri atas fasilitas fiskal, yang berupa perpajakan, kepabeanan dan cukai, pajak daerah dan retribusi daerah, dan fasilitas nonfiskal, yang berupa fasilitas pertanahan, perizinan, keimigrasian, investasi, dan ketenagakerjaan, serta fasilitas dan kemudahan lain yang dapat diberikan pada Zona di dalam KEK, yang akan diatur oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan kawasan Mandalika sebagai KEK diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang pada Pasal 5 menyebutkan secara spesifik bahwa KEK Mandalika merupakan KEK Zona Pariwisata.

Berdasarkan informasi dari *website* resmi Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia, pengelolaan diketahui bahwa Pembangunan dan Pengelolaan KEK Mandalika diserahkan kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).¹

Berdasarkan Siaran Pers ITDC Nomor: 38/PR-ITDC/XI/2019, diketahui bahwa ITDC telah menyerahkan mandat pengelolaan event MotoGP Indonesia 2021 kepada MGPA. Mandalika Grand Prix Association (MGPA) merupakan unit usaha ITDC, yang memiliki bisnis utama mengelola dan mengoperasikan Mandalika International Street Circuit (Sirkuit Mandalika) melalui penyelenggaraan balapan motor dan event entertainment kelas dunia termasuk penyelenggaraan MotoGP Indonesia Indonesia. Selanjutnya ITDC mendapatkan kepastian penyelenggaraan event MotoGP di KEK Mandalika setelah ITDC menandatangani Promoters Agreement dengan Dorna pada 28 Januari lalu di Madrid dimana Mandalika ditunjuk untuk menjadi tuan rumah balap MotoGP selama 5 tahun mulai tahun 2021 dan juga mendapatkan kontrak untuk menggelar FIM MOTUL Superbike World Championship (WSBK).²

¹ http://kek.go.id/assets/images/mapfile/Keputusan-Bupati-Lombok-Tengah-No-512-Tahun-2014_20170906090537.pdf

² <http://www.bumn.go.id/itdc/berita/1-Siaran-Pers-Nomor-38-PR-ITDC-XI-2019>